

**Catatan Pertemuan  
Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI VII  
Jakarta, 12 Desember 2011**

**“Operasionalisasi Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi  
Indonesia (MP3EI) di Kawasan Timur Indonesia”**

**Arahan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas**

MP3EI tidak dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, ataupun proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang selama ini telah berjalan. MP3EI akan menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer terhadap dokumen perencanaan pembangunan yang ada tersebut, serta merupakan dokumen penting dan khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan *breakthrough* yang didasari oleh semangat “*Not Business As Usual*”, melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, melainkan merupakan upaya kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (Swasta, BUMN dan BUMD), serta masyarakat. Pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai *regulator, fasilitator, dan katalisator*.

Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan perijinan adalah: a) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang; b) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang telah ada, baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antar kementerian/lembaga; c) merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI; d) memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan strategi MP3EI; e) mempercepat dan menyederhanakan proses, serta memberikan kepastian perijinan.

Dari sisi fasilitasi dan katalisasi, Pemerintah akan mendukung percepatan dan perluasan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur. Pemerintah telah menyusun “Rencana Investasi Pembangunan Infrastruktur” untuk Tahun Anggaran 2011-2015 sebesar Rp 755 triliun, dengan alokasi dana Pemerintah sebesar Rp 544 triliun, dan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS/PPP) sebesar Rp 211 triliun.

Dalam rangka koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan MP3EI 2011-2025, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang diketuai langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI sebagai wakilnya. Sedangkan Ketua Harian dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Wakil Ketua Harian dijabat oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Saat ini telah disusun mekanisme kerja MP3EI beserta tim kerja yang terdiri dari Tim Kerja Lintas Sektor dan Tim Kerja Koridor. Tim Kerja Lintas Sektor, baik sektor regulasi, konektivitas, serta SDM dan IPTEK, akan menyusun Prioritas Pembangunan Tahunan MP3EI tahun 2011 sampai dengan 2014. Prioritas Pembangunan Tahunan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi pelaksanaan setiap kegiatan/proyek termasuk rencana pendanaan untuk tahun 2011-2012 yang merupakan putaran pertama pelaksanaan MP3EI. Selanjutnya, Tim Kerja Koridor melakukan identifikasi investasi swasta dan BUMN tahun 2011-2014 yang kemudian disusun dalam bentuk Rencana Aksi pelaksanaan investasi yang telah memiliki komitmen untuk dilaksanakan tahun 2011-2012.

Mengingat MP3EI tidak hanya menekankan pada pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh pusat, namun juga pada sinergi pembangunan pusat dan daerah dalam rangka menjaga keuntungan kompetitif nasional, diharapkan agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar implementasi kegiatan di lapangan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam menciptakan iklim yang kondusif pada saat investasi berjalan, baik dalam aspek ketersediaan lahan, tata guna lahan. Sinkronisasi peraturan pusat daerah, kebijakan tenaga kerja di daerah, dan lainnya.

Selain itu, pelaksanaan MP3EI diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan khususnya yang berada di KTI, dimana daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki keunggulan geografis karena berdekatan dengan lokasi koridor ekonomi, diarahkan menjadi *hinterland* yang berfungsi sebagai pusat produksi dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan simpul kegiatan Koridor Ekonomi.

Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI hendaknya dapat menjadi kesempatan yang baik untuk mendiseminasikan kebijakan pemerintah, melakukan pertukaran informasi dan pembelajaran, serta untuk mendapatkan rumusan yang terbaik dalam mendukung implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khususnya di KTI.

**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Koordinator MP3EI: Perkembangan Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)**

- Maksimalisasi pengelolaan aset pada wilayah
- Maksimalisasi pemanfaatan akses pada wilayah
- Engineering asset dilihat di MP3EI
- MP3EI memperlihatkan keberpihakan pada KTI
- Bitung adalah perekat Kawasan Timur Indonesia. Bitung menjadi pintu gerbang nasional atas pasar Asia Timur, Amerika, Oceania dalam meningkatkan daya saing global Indonesia; meningkatkan leverage ekonomi KTI secara substansial, pusat Cabotage, mendorong dan mengangkat nilai tambah dan rantai nilai industri nasional, termasuk industri maritim nasional (perkapalan, perikanan, dan kelautan nasional).

**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penanggung jawab Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Perkembangan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara**

- Tema: Pintu Gerbang Pariwisata dan Pangan
- 3 sektor utama: pariwisata, peternakan, perikanan
- Ada 136 kegiatan (pariwisata, peternakan, perikanan, infrastuktur) dengan total nilai: Rp 210 Triliun. Pemerintah menyumbang sekitar 8.5%
- Untuk efisiensi, perlu dibentuk tim kerja di daerah. Bappeda diharapkan untuk mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor.
- Daerah perlu menentukan sektor prioritas, identifikasi tantangan dan kendala dalam melaksanakan MP3EI.
- Kerja sama antar sektor dan antar daerah sangat diperlukan.

**Kementerian Perhubungan, penanggung jawab Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku: Perkembangan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku**

- Percepatan dan pembangunan ekonomi tidak hanya berbasis aset, tapi juga aksesibilitas dan konektivitas yang merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan.
- Koridor Ekonomi Papua-Maluku terdiri dari 5 hub: Sorong, Manokwari, Wamena, Jayapura, dan Merauke. Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PDRB sebesar 6.3 kali dari \$ 13 Milyar di 2008 ke \$ 83 Milyar di 2030 dengan estimasi laju pertumbuhan koridor sebesar 9.6% dibandingkan estimasi baseline sebesar 7.0%.
- Fokus sektor pada: 1) Pertambangan terutama tembaga dan emas. Mendorong eksplorasi lokasi tambang baru melalui dukungan infrastruktur. Mendorong *forward integration* melalui kegiatan produksi hilir, 2) Pertanian dan Perkebunan. Meningkatkan produksi melalui Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
- Beberapa isu strategis pada Koridor Papua Maluku yang perlu menjadi perhatian:

<b>Substansi</b>	<b>Tantangan</b>	<b>Usulan Keputusan</b>
Infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas di Merauke</li> <li>• Keterbatasan kapasitas pelabuhan/ airstrip untuk pengembangan industri di Wetar</li> <li>• Keterbatasan kapasitas jalan akses, pelabuhan dan bandara di Halmahera</li> <li>• Keterbatasan energi yang dibutuhkan untuk industri di Halmahera Utara</li> <li>• Belum ada sumber energi listrik di Wetar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan baru dan perbaikan signifikan terhadap infrastruktur yang telah ada.</li> <li>• Peningkatan kapasitas pelabuhan ferry (Lerokis) dan airstrip di Wetar</li> <li>• Peningkatan kapasitas jalan, pelabuhan dan bandara di Halmahera</li> <li>• Pengembangan potensi geothermal di Halmahera Utara</li> <li>• Penyediaan energi listrik di Wetar</li> </ul>
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTRW Provinsi dan Kabupaten masih ada yang belum final</li> <li>• Tumpang tindih kawasan hutan dan wilayah pertambangan terkait dengan penerapan UU Kehutanan dan Pertambangan</li> <li>• Koordinasi dan sinergi kebijakan dan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah serta antar instansi terkait</li> <li>• Fasilitas perpajakan dan rasionalisasi pungutan pajak daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTRW Provinsi dan kabupaten agar segera difinalkan dan mempercepat proses legalisasi.</li> <li>• Perizinan satu atap yang terpadu</li> <li>• Pemberian kebijakan khusus dari pemerintah terkait insentif bagi inventasi</li> </ul>
SDM dan Iptek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pendidikan perkebunan untuk masyarakat asli di Merauke</li> <li>• Kuantitas dan kualitas SDM untuk penguasaan teknologi penirisan tembaga masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat asli Merauke bidang perkebunan</li> <li>• Pelatihan dan</li> </ul>

Substansi	Tantangan	Usulan Keputusan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterampilan tenaga kerja lokal untuk produksi emas masih terbatas</li> <li>Terbatasnya tenaga terampil dalam bidang industri nikel</li> </ul>	<p>pendidikan SDM lokal dan nasional bidang teknologi penirisan tembaga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sarana pendidikan dan iptek produksi emas di Halmahera Utara</li> <li>Peningkatan kualitas pendidikan SMA, SMK dan universitas serta pembangunan D3 Politeknik di Halmahera</li> </ul>

- Daftar Investasi Infrastruktur yang teridentifikasi di Koridor Papua-Maluku:

Pemerintah

No	Proyek	Nilai Investasi (IDR Milyar)	Periode Mulai	Periode Selesai	Lokasi
1	Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre	200	2011	2014	Papua
2	Pelabuhan Serui	567	2011	2014	Papua
3	Adpel Ambon	363	2011	2014	Maluku
4	Adpel Jayapura	328	2011	2014	Papua
5	Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Raja Ampat dan Arar - Sorong	318	2011	2014	Papua Barat
6	Pelabuhan Waren	306	2011	2014	Papua
7	Lanjutan pembangunan Pelabuhan Samudera Perikanan Merauke	300	2011	2014	Papua

No	Proyek	Nilai Investasi (IDR Milyar)	Periode Mulai	Periode Selesai	Lokasi
8	Pelabuhan Teminabuan	261	2011	2014	Papua
9	Pelabuhan Bade	237	2011	2014	Papua
10	Pelabuhan Buli	226	2011	2014	Maluku Utara
11	Pelabuhan Jailolo	210	2011	2014	Maluku Utara
12	Adpel Merauke	210	2011	2014	Papua
13	Pelabuhan Tobelo	201	2011	2014	Maluku Utara
14	Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Falabisahaya - Malut	201	2011	2014	Maluku Utara
15	Pelabuhan Kaimana	188	2011	2014	Papua Barat
16	Pelabuhan Labuha/Babang	180	2011	2014	Maluku Utara
17	Pelabuhan Sarmi	169	2011	2014	Papua
18	Adpel Biak	168	2011	2014	Papua
19	Pelabuhan Nabire	160	2011	2014	Papua
20	Pelabuhan Agats	159	2011	2014	Papua
21	Pelabuhan Saunek	153	2011	2014	Papua Barat
22	Adpel Ternate	150	2011	2014	Maluku Utara
23	Pelabuhan Kokas	145	2011	2014	Papua Barat
24	Unit Penyelenggara Pelabuhan Amamapare	135	2011	2014	Papua
25	Pelabuhan Gebe	134	2011	2014	Maluku Utara

No	Proyek	Nilai Investasi (IDR Milyar)	Periode Mulai	Periode Selesai	Lokasi
26	Pengembangan pelabuhan di Sorong	129	2011	2014	Papua Barat
27	Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meter-Pelabuhan Sofifi	100	2011	2014	Maluku Utara
28	Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meter-Pelabuhan Merauke	100	2011	2014	Papua

Campuran:

No	Proyek	Nilai Investasi (IDR Milyar)	Periode Mulai	Periode Selesai	Lokasi
	<b>TRANSPORTASI LAUT</b>				
1	Jayapura Port	43.000	2011	2015	Papua
2	Pelabuhan Merauke	9.000	2012	2015	Papua
3	Peningkatan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Timika	500	2011	2015	Papua
	<b>TRANSPORTASI UDARA</b>				
1	Rehabilitasi Bandara termasuk Perpanjangan Runway Bandar Udara Morotai	150	2011	2014	Maluku Utara

**Kementerian Kelautan dan Perikanan, penanggung jawab Koridor Ekonomi Sulawesi: Perkembangan Koridor Ekonomi Sulawesi**

- Koridor Ekonomi Sulawesi  
Tema Pembangunan: Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nikel  
Pusat Ekonomi: Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado dan Mamuju  
Kegiatan Ekonomi Utama: Pertanian Pangan, Kakao, Perikanan, Nikel, dan Migas

- **Action Plan:**

- **Tanaman Pangan**

- Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian
- Pengembangan keberlanjutan lumbung pangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani
- Pembangunan/perbaikan jaringan irigasi teknis usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), dan tata air mikro (TAM)
- Revitalisasi dan peningkatan kapasitas gudang dan penyimpanan
- Peningkatan produktivitas melalui penggunaan teknologi tepat guna

- **Kakao**

- Diversifikasi pasar ekspor olahan (butter, powder, cake, dan lain-lain) yang memberi nilai tambah dalam rantai nilai kakao
- Peningkatan akses jalan yang lebih baik dari lokasi perkebunan menuju industri pengolahan, pelabuhan dan pusat perdagangan regional maupun ekspor;
- Peningkatan kapasitas infrastruktur (listrik, air, telekomunikasi) pada seluruh kawasan produksi dan industri pengolahan kakao.
- Peningkatan pendidikan petani melalui fasilitasi pendidikan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan dan diseminasi teknik budidaya dan pengolahan kakao bagi petani kakao

- **Perikanan**

- Pengembangan kawasan Minapolitan perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- Peningkatkan nilai tambah dan mutu produk hasil perikanan
- Pengembangan infrastruktur pendukung utama perikanan (pelabuhan, jalan akses, listrik, saluran tertier, dll)
- Peningkatan keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan serta penguatan penyuluh perikanan
- Peningkatan diseminasi iptek

- **Nikel**

- Perbaikan peraturan terkait pertanahan dan memperjelas tata guna lahan melalui tata ruang
- Pembangunan infrastruktur pelabuhan laut yang dapat melayani pengiriman peralatan dan bahan baku dari daerah lain

- **Migas**

- Optimalisasi produksi migas melalui peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi setempat
- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bakar gas
- Peningkatan dan pengembangan akses ke daerah-daerah eksplorasi dan eksploitasi baru, baik di daratan maupun di lepas pantai

- **Tim Kerja Koridor Ekonomi Sulawesi**



- Sekretariat Tim Kerja
- Sub Tim Kerja Tanaman Pangan dan Kakao
- Sub Tim Kerja Perikanan
- Sub Tim Kerja Energi dan Sumberdaya Mineral

Daerah diharapkan segera membentuk KP3EI Daerah per Provinsi.

Tugas Tim Kerja Koridor Ekonomi Sulawesi:

- Mengkoordinasi pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Sulawesi.
- Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MP3EI.
- Melakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- Menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan MP3EI.
- Melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Harian KP3EI.

Perlu dukungan pemerintah daerah dalam hal:

- Membentuk KP3EI daerah.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan list proyek MP3EI dengan instansi terkait, baik pemerintah dan swasta, untuk dilaksanakan *groundbreaking*.
- Melakukan pendampingan untuk percepatan pelaksanaan dan penyelesaian *debottlenecking* yang ada di daerah.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proyek.
- Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan proyek.

**Pokja Forum KTI Wilayah Sulawesi Selatan: Pembangunan Ekonomi Daerah di KTI: Perspektif Sulawesi Selatan**

- Ketimpangan antara KBI dan KTI adalah realitas perekonomian daerah selama lebih dari empat dekade terakhir. Sampai saat ini masih terus menjadi tema pembicaraan yang menarik. Bagaimana gambarannya dan akan seperti apa kecenderungannya ke depan?
- Penting dipahami bahwa keberadaan SulSel juga mencerminkan gambaran ketimpangan bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di KTI. Karena itu, mencermati data SulSel memiliki daya tarik tersendiri. Bila perekonomian daerah SulSel mencatat perkembangan yang pesat, sebagaimana data-data makro beberapa tahun terakhir, pertanyaannya, akankah kesenjangannya dengan perekonomian nasional bisa semakin dipersempit? Bila jawabannya adalah 'ya', maka bisa saja berarti perekonomian daerah SulSel akan semakin besar kesenjangannya dengan daerah-daerah lain di KTI. Tetapi, bila jawabannya adalah 'tidak', sepatutnya menjadi keprihatinan, oleh karena pertanyaannya, bagaimana kesenjangan perekonomian daerah-daerah lain di KTI terhadap perekonomian nasional.
- Sejak sekitar dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi SulSel selalu berada diatas angka laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pada saat krisis multi

dimensi pada akhir dekade 1990an, marjin perbedaannya cukup signifikan. Hanya saja pertumbuhan ekonomi Sulsel menunjukkan dimensi yang berbeda, dalam dua dekade terakhir. Bila sebelumnya pertumbuhan ekonomi Sulsel lebih didorong oleh sektor ril, maka dewasa ini dorongan sektor konsumsi cukup signifikan. Tetapi tetap saja pertumbuhan ekonomi Sulsel yang melaju dalam tiga tahun terakhir dalam ukuran 'single-digit'. Padahal untuk mempersempit kesenjangan Sulsel dan Nasional harus mampu melaju dengan 'double-digit'. Itu sebabnya kontribusi PDRB Sulsel terhadap PDB Nasional masih tetap kecil dan belum meningkat secara signifikan.

- Marjin perbedaan antara pertumbuhan PDRB per kapita Sulsel dan PDB per kapita Nasional, kurun waktu 2006-2010, tercermin relatif stabil perbandingannya. Artinya, untuk dapat mempersempit kesenjangan, memang pertumbuhan ekonomi Sulsel dituntut lebih pesat lagi, 'double-digit'. Patut diduga, dan seyogyanya mendapatkan perhatian penentu kebijakan di Sulsel, bahwa di daerah ini masih berlangsung in-efficiency dalam pembentukan nilai tambah sektor-sektor ekonomi. Dugaan ini, bila disertai oleh dugaan lainnya, yaitu masih terjadi transaction costs yang sangat tinggi, maka masih akan sulit untuk memacu pertumbuhan ekonomi Sulsel untuk mencapai 'double-digit'. Oleh karena berarti terdapat sejumlah bottlenecking penciptaan nilai tambah dalam perekonomian daerah ini. Bagaimana dengan daerah-daerah lain di KTI?
- Dalam perekonomian daerah Sulsel, sektor pertanian yang masih berciri sektor primer masih merupakan penyumbang terbesar. Bila digabungkan dengan sektor primer lainnya, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, tentu saja akan menghasilkan kontribusi akan lebih besar lagi. Sedangkan kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan, listrik/gas/air bersih) masih berada dibawah kontribusi sektor primer diatas. Kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor tersier (perdagangan, hotel, angkutan, komunikasi, keuangan dan jasa lainnya). Gambaran ini menjustifikasi bahwa memang perekonomian daerah Sulsel masih signifikan didorong pertumbuhannya oleh sektor konsumsi ketimbang sektor ril. Gambaran seperti ini nampaknya membutuhkan terobosan kebijakan yang bersifat out of the box.
- Dalam bahasa MP3EI, perekonomian Indonesia tidak boleh lagi hanya didasarkan pada 'efficiency-driven economy'. Karena itu berarti hanya mengembangkan business as usual. Padahal, bisa diduga bahwa perekonomian daerah di KTI bahkan belum mencapai apa yang dimaksud dengan 'efficiency-driven economy'. MP3EI secara eksplisit menggunakan istilah yang bersifat 'high-call', yaitu keinginan untuk menghadirkan 'innovation-driven economy'. Mengisyaratkan perlunya mengkreasikan perkembangan ekonomi nasional yang bersifat out of the box dan not business as usual. Bagaimana perekonomian daerah Sulsel dan daerah-daerah lain di KTI mampu menempatkan dirinya dalam kerangka perkembangan seperti ini?
- Dari data Penggunaan PDRB Sulsel, terlihat menggembirakan bahwa pembentukan modal tetap bertumbuh double-digit dalam kurun waktu 2005-2010. Hanya saja perlu ditelaah lebih lanjut sektor ekonomi yang mana yang

berkontribusi besar dalam pembentukan modal tetap tersebut. Oleh karena bila terjadi pada sektor tersier, itu berarti penguatan sektor primer belum menggembirakan.

- Dalam hal tingkat pengangguran, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di SulSel sudah secara konsisten berada dibawah angka rata-rata nasional, tetapi dengan margin penurunan yang relatif sangat kecil. Angka IPM SulSel, 2006-2010, tercatat sebagai daerah yang pesat peningkatannya, walaupun masih selalu berada dibawah angka rata-rata nasional. Baik dicermati dari composite yang membentuk angka IPM ini, maupun dan apalagi tarikan ke bawah IPM daerah-daerah tertinggal di SulSel nampaknya signifikan. Angka IPM Sulsel belum banyak didorong bawah oleh composite pada sektor pendidikan. Prosentase penduduk miskin di SulSel, secara konsisten menurun dan berada dibawah angka rata-rata nasional selama 2006-2010. Namun, untuk penanganan masalah kemiskinan di daerah ini ke depan, mungkin perlu menumpang-tindihkan angka-angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan secara wilayah untuk bisa menemukan program strategis yang bersifat terintegrasi.
- Dengan semua gambaran diatas, selanjutnya konsep berpikir MP3EI penting untuk dicermati. Pendapatan per kapita nasional diarahkan mengacu pada pendapatan per kapita negara-negara di dunia. Pada tahun 2010, Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah berada diatas \$ 3,000 AS, pada saat yang sama Sulsel diperkirakan sekitar \$1,600 AS. Diproyeksikan pada tahun 2014, Nasional akan mencapai \$4,800 AS. Kalaupun SulSel bertumbuh double digit, katakanlah 15 % per tahun, pada tahun 2014 belum bisa mencapai \$ 3,000 AS, artinya kesenjangan akan bertambah besar dibandingkan dengan Nasional. Padahal sangat sulit membayangkan SulSel bisa bertumbuh 15 % per tahun. Bisa dibayangkan bagaimana kesenjangan dengan Nasional, bila target pendapatan per kapita Nasional pada tahun 2025 sesuai dengan MP3EI ini mampu dicapai. Bagaimana dengan daerah-daerah lain di KTI?
- Nampaknya kata kunci innovation driven economy ini, sejak diberangkatkan dari efficiency driven economy. dalam waktu dekat ke depan terletak pada atau akan diperankan oleh Riset dan Pengembangan. Tetapi tidakkah hal ini justru menjadi faktor yang akan semakin membuat perekonomian daerah di KTI semakin tertinggal? Saat ini saja kepada daerah-daerah di KTI baru ingin didorong dan diinisiasi untuk mengembangkan sektor pengetahuan, misalnya mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk tujuan pembangunan daerah.
- Dalam skim indikasi investasi MP3EI, seluruh KTI plus Bali diharapkan dapat menyerap 31 % dari investasi yang sebesar Rp. 3,350 Triliun. Mungkin yang patut dikritisi adalah bahwa dari total investasi tersebut, dari pemerintah hanya delapan persen. Porsi terbesar, 44 % akan datang dari sektor swasta, berarti tugas menarik investasi bagi daerah-daerah di KTI, sangat amat tidak mudah direalisasikan. Apalagi bila diperhatikan sektor-sektor yang diarahkan untuk tujuan investasi tersebut. Padahal sekaligus pada sektor-sektor tersebut diharapkan kesempatan kerja akan terbuka.

- Mungkin tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa dengan MP3EI, tantangannya tidak ramah bagi daerah-daerah di KTI. Jangankan out of the box atau not business as usual, yang in the box atau business as usual saja masih harus melalui upaya yang tidak ringan, melihat realitas yang ada saat ini. Mudah-mudahan MP3EI ini, tidak sekaligus merupakan kerangka yang akan semakin memperlebar kesenjangan di tanah air.

**MATRIKS OPERASIONALISASI MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)  
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

<b>Provinsi</b>	<b>Tantangan Pelaksanaan MP3EI</b>	<b>Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor</b>	<b>Inovasi (Semangat Not Business Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI</b>	<b>Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi</b>
<b>Sulawesi Utara</b>	Klim Investasi dan iklim Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencabut perda yang menghambat investasi</li> <li>- Meningkatkan Peran lembaga pelayanan Satu pintu</li> <li>- Informasi ketersediaan lahan yang tidak bermasalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyederhanaan Peraturan dan Birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan Peraturan yang bersifat regional</li> </ul>
	Tata Ruang yang tumpang tindih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi Tata Ruang</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata Ruang Regional</li> </ul>
	Produk yang berdaya saing ekspor masih kurang pertumbuhan yang lambat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produktivitas Tanaman Perkebunan dan Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Value added Produk unggulan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Komoditas Unggulan Regional</li> <li>- Terminal agribisnis</li> </ul>
	Pelayanan/Pengelolaan Pelabuhan Yang Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan Pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengupayakan Pengelolaan Pelabuhan Oleh Main Line Operator (MLO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinsi Sekitar Dapat Memanfaatkannya Sebagai Pelabuhan Muat Komoditi Ekspor</li> </ul>
	Meningkatkan transportasi darat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan jalur Kereta api</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalur Kereta api melewati sentra produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalur kereta api</li> </ul>
	Sarana Pelabuhan yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas pelabuhan ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun pelabuhan tiap-tiap kepulauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konektivitas setiap pelabuhan di Indonesia timur</li> </ul>

<b>Provinsi</b>	<b>Tantangan Pelaksanaan MP3EI</b>	<b>Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor</b>	<b>Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI</b>	<b>Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi</b>
	Infrastruktur jalan pendukung yang kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun infrastruktur jalan</li> <li>- Peningkatan status jalan Provinsi menjadi jalan nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur jalan dari sentra ekonomi ke pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur jalan yang terkoneksi terutama antara provinsi yang berbatasan</li> </ul>
	Ketersediaan energi listrik yang masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pemanfaatan energi terbarukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan Energi Listrik yang berasal dari panas bumi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interkoneksi jaringan Listrik</li> </ul>
	Biaya Tinggi Untuk Angkutan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunkan Biaya Angkutan dan Barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghitung biaya yang tepat dari setiap jasa di pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan secara regional untuk Biaya angkutan dan barang</li> </ul>
	Jaringan Komunikasi yang terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan jaringan Komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan proyek e-Gov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masing-masing provinsi harus ada e-Gov</li> </ul>
	Destinasi Pariwisata Masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Destinasi pariwisata sesuai dengan karakteristik Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Destinasi pariwisata diserahkan pada swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konektivitas destinasi pariwisata</li> <li>- Penerbangan antar kota se Sulawesi</li> <li>- Promosi Bersama Regional</li> <li>- Paket wisata yang terpadu</li> </ul>
	SDM yang Belum Mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan/Pendirian Politeknik Berbasis Unggulan Daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>o Politeknik Geothermal</li> <li>o Politeknik Perikanan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap Provinsi se-Indonesia Timur Dapat Memanfaatkan Bersama Politeknik Ini.</li> </ul>

<b>Provinsi</b>	<b>Tantangan Pelaksanaan MP3EI</b>	<b>Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor</b>	<b>Inovasi (Semangat Not Busines as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI</b>	<b>Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi</b>
<b>Sulawesi Selatan</b>	Penyiapan Design Proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Data yang akurat</li> <li>- Pemilihan Lokasi yang Tepat</li> <li>- Perhitungan anggaran yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan Tenaga ahli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterkaitan Proyek : bahan baku, tenaga kerja, pasar</li> </ul>
	Pembebasan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Tim khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda menyiapkan lahan sejak awal sebagai bagian dari saham pemda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Kawasan Khusus Ekonomi</li> </ul>
	Aturan / Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencabut aturan yang menghambat</li> <li>- Membuat aturan yang mendorong investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aturan khusus yang harus melibatkan masyarakat / usaha lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan aturan berskala regional</li> </ul>
	Penyiapan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan pendidikan teknis / kejuruan</li> <li>- Ilmu – ilmu terapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama dengan dunia usaha</li> <li>- Enterpreunership, sub kontrak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama penyiapan SDM yang siap pakai</li> </ul>
	Penyiapan Perusahaan lokal untuk bermitra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan dokumen</li> <li>- Persiapan SDM</li> <li>- Persiapan sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan / training</li> <li>- Melayani secara cepat dokumen yang akan dibuat</li> <li>- Fasiltasi dan mediasi dgn perbankan dan asuransi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama penetapan standar mutu usaha dan SDM</li> </ul>
	Peningkatan Produktifitas dan kualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi</li> <li>- ektensifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan teknologi, benih unggul</li> <li>- Pencetakan areal baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target Produksi berskala regional sebagai daerah ketahanan pangan di Indonesia</li> <li>- Mutu yang dapat memenuhi standar</li> </ul>

<b>Provinsi</b>	<b>Tantangan Pelaksanaan MP3EI</b>	<b>Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor</b>	<b>Inovasi (Semangat Not Busines as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI</b>	<b>Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi</b>
				internasional
	Pengamanan Produksi	- Pengendalian organisme pengganggu Tanaman - Perubahan iklim - Lumbung dan gudang	- Teknologi paska panen -	- Sistem pengendalian skala Regional
	Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan	- Gapoktan - Penyuluhan - Perbankan	- Tim terpadu (praktisi, akademisi, birokrat)	- Kerjasama industry dan pasar
	Prasarana dan sarana produksi terbatas	- Meningkatkan prasarana dan sarana produksi	- Melibatkan dunia usaha - perbankkan	- interkoneksi
	Kontrak karya yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal	- Mengupayakan sisa lahan dapat ditawarkan kepada investor baru	- Mendorong Pemerintah untuk mengkaji kembali kontrak karya	- Kerjasama pertambangan
	Meningkatkan transportasi darat	- Meningkatkan kualitas jalan - Pembuatan jalur kereta api	- Pelebaran jalan dan jalan beton - Jalur Kereta api melewati sentra produksi	- interkoneksi
	Sarana Pelabuhan yang belum memadai	- Meningkatkan kapasitas pelabuhan ekspor	- Talud, Reklamasi, Jalan Akses - Dermaga Peti Kemas, Penumpang, Lapangan Penumpukan, Peralatan Bongkar Muat	- Pelabuhan Hub International
	Sarana Bandara	- Meningkatkan Kapasitas	- Kerjasama dengan Negara	- Bandara International



<b>Provinsi</b>	<b>Tantangan Pelaksanaan MP3EI</b>	<b>Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor</b>	<b>Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI</b>	<b>Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi</b>
		Rute luar negeri  - Pembangunan dan Pengembangan Bandara	lain - Hanggar Pemeliharaan Pesawat - Hotel, Pusat Pengepakan, Business centre, Pusat Perbelanjaan.  - Bandara Tana Toraja, Selayar, Palopo, Luwu Timur,	- Bandara yang menunjang pariwisata dan mendukung perekonomian wilayah
	Potensi Gas yang cukup besar	- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan sumber energi	- City Gas	- Kerjasama City Gas se Sulawesi
	Pengembangan industri yang berbasis pertanian dan perikanan	- Meningkatkan nilai tambah produk unggulan	- Sharing anggaran Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab./Kota serta dunia usaha	- Kerjasama untuk pemenuhan bahan baku yang berskala industry - Kerjasama untuk membuka pasar
	Kawasan Center Point of Indonesia	- Penyiapan / Pematangan lahan	- Kawasan yang menguntungkan - Akses telah tersedia - Wisma Negara Republik Indonesia - Menara Indonesia Bangkit - Masjid dan Museum	- Kerjasama Pemanfaatan untuk event – event internasional - Kerjasama Promosi
	Kawasan Mamminasata	- Perumahan, Hotel, Ruang Pertemuan, Penghijauan,	- Pelayanan satu atap	- Kerjasama wisata ,industry dan

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Busines as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
		Ring Road , Monorail, Pariwisata, industri		perdagangan
	Industri Gula, Kapal, Semen, Kelapa Sawit, pertambangan	- Meningkatkan kemampuan industri	- Meningkatkan Kualitas industry dan mendorong efisiensi	- Kerjasama proses produksi dan pasar
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengumpulkan hasil alam;</li> <li>• Penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masih sangat kurang;</li> <li>• Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, 49,22 % tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara berpendidikan tidak tamat SD dan tamat SD/ sederajat (Sultra</li> </ul>	<p>Pembentukan <b>Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Pertambangan</b> (Nikel) Kawasan Industri Pertambangan Nasional, meliputi seluruh wilayah Sulawesi Tenggara yang terbagi dalam Pusat-Pusat Kawasan berdasarkan potensi tambang yang tersedia.</p> <p>Pusat Kawasan yang menjadi prioritas adalah Kawasan Konawe Utara dan Kolaka Utara, masing-masing pusat kawasan memiliki pengelola, infrastruktur serta fasilitas pendukung lainnya.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Nilai Tambah Produksi</li> </ul>	<p><b>Pengelolaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komoditas pertambangan yang dikembangkan dalam kawasan ekonomi khusus meliputi : Nikel, Aspal dan Emas;</li> <li>• Usaha pertambangan dikelola oleh suatu perusahaan terbatas yang bersifat "PUBLIC PRIVATE COMMUNITY PARTNERSHIP" yang pemiliknya adalah pemerintah, masyarakat dan pengelola profesional;</li> <li>• Pengelola profesional adalah mitra strategis yang diseleksi oleh Lembaga Kawasan Ekonomi Khusus;</li> <li>• Modal yang dikelola</li> </ul>	Belum ada <i>Action Plan</i> namun diharapkan dapat dikoordinasikan melalui Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS)

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	<p>Dalam Angka-BPS, 2010)</p>	<p>Pertambangan (efektifitas) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan penerimaan Negara melalui pajak, retribusi, bagi hasil dan dana-dana pembangunan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>• Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka optimalisasi sumberdaya alam yang berkelanjutan</li> </ul>	<p>melalui kapitalisasi asset dan penyertaan pemerintah dalam memberikan fasilitasi penjaminan pinjaman modal dan penyertaan modal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah mendelegasikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah untuk menyelesaikan izin-izin dan atau sertifikasi yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kawasan khusus dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>• Pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh lembaga professional pemerintah dan non pemerintah untuk semua</li> </ul>	

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
			bisnis dan fungsi produksi termasuk pengelolaan dan pengendalian lingkungan.	
Sulawesi Barat	Masih kurangnya Infrastruktur jalan, listrik, pelabuhan.	Melakukan Expo dalam dan Luar Negeri dengan program-program investasi infrastruktur	Kemauan Politik yang baik	Membangun / membuka Infrastruktur jalan dari Mamuju ke Palopo Utara dan Tator
	Kurangnya Dana / Modal dalam pelaksanaan MP3EI	Menyiapkan data potensi daerah	Membangun jaringan yang luas kepada dunia usaha/investor	Menambah jumlah dan route penerbangan udara
	Kurangnya SDM dan IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi Birokrasi dan Pajak Daerah</li> <li>• Membangun Kawasan Industri</li> <li>• Membangun dan memperbaiki Infrastruktur jalan dan Jembatan</li> <li>• Membangun Power Plant PLTA Karama</li> <li>• Memperluas Bandara Tampa Padang</li> <li>• Membangun Pelabuhan Container</li> <li>• Membangun pusat-pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen terhadap <i>good and clean government</i></li> <li>• Membangun dengan tidak merusak lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat Penyelesaian Bandar udara Sumarorong</li> <li>• Memfungsikan station Penelitian kakao di Polman <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan pembangunan jalur kereta api dari Sulut, Sulsel dan Sultra.</li> </ul> </li> </ul>

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
		<p>pertumbuhan dengan pengembangan klaster dan Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya unggulan atau komoditas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama</li> </ul>		
<b>Gorontalo</b>	- Iklim Investasi dan iklim Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Peran BID dalam pelayanan Satu pintu</li> <li>- Informasi ketersediaan lahan yang tidak bermasalah</li> <li>- Peta Potensi investasi</li> <li>- Perda RTRW Prov. Gorontalo dan RTRW kab/Kota</li> <li>- Usulan KEK di kab. Pohuwato dan Gorontalo Utara</li> <li>- Peta Potensi Sumber Daya Alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyederhanaan Peraturan dan Birokrasi</li> <li>- Rencana Detail Kawasan Strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan Peraturan yang bersifat regional</li> <li>- Masterplan investasi regional</li> <li>- RTR Pulau Sulawesi (Perpres??)</li> </ul>
	- Produk yang berdaya saing ekspor masih	- Meningkatkan produktivitas Tanaman Pertanian dan	- Meningkatkan Value added Produk unggulan daerah	- Peta Komoditas Unggulan Regional

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan</li> <li>- Perluasan areal pertanian</li> <li>- Peningkatan penggunaan alat mesin</li> <li>- Pembangunan lumbung, gudang &amp; Processing</li> <li>- Pengembangan sentra-sentra produksi rumput laut di sekitar kawasan Industri di Gorontalo</li> <li>- Pembangunan/perbaikan Jaringan Irigasi teknis dan irigasi desa di kawasan sentra2 produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviitalisasi dan peningkatan kapasitas gudang &amp; penyimpanan yang ada</li> <li>- Perbaikan akses jalan untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak perantara dagang</li> </ul>	(BKPRS-UNIDO) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminal agribisnis</li> </ul>
	- Pelayanan/Pengelolaan Pelabuhan Yang Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan masterplan kawasan pelabuhan khususnya pelabuhan perikanan</li> <li>- Peningkatan Pelayanan Pelabuhan</li> <li>- Peningkatan fasilitas dan sarana &amp; prasarana pelabuhan perikanan</li> </ul>	- Mengupayakan Pengelolaan Pelabuhan Oleh Main Line Operator (MLO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinsi Sekitar Dapat Memanfaatkannya Sebagai Pelabuhan Muat Komoditi Ekspor</li> <li>- Konetivitas setiap pelabuhan di Indonesia timur</li> </ul>
	- Meningkatkan transportasi darat dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan jalur Kereta api dan stasiun kereta</li> <li>- Peningkatan status</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalur Kereta api melewati sentra produksi</li> <li>- Merevitalisasi angktn</li> </ul>	- Masterplan kereta api (kementerian Perhubungan)

<b>Provinsi</b>	<b>Tantangan Pelaksanaan MP3EI</b>	<b>Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor</b>	<b>Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI</b>	<b>Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi</b>
		pelabuhan khususnya di daerah kawasan ekonomi khusus	penyeberangan, pelabuhan lokal	
	- Infrastruktur jalan pendukung yang kurang	- Membangun infrastruktur jalan - Peningkatan status jalan Provinsi menjadi jalan nasional - Pembangunan jalan akses ke sentra2 produksi dan sentra industri	- Infrastruktur jalan dari sentra produksi ke pelabuhan dan sentra industri - Masterplan Infrastruktur -	- Interkoneksi jalan antar provinsi
	- Ketersediaan Energi listrik yang masih kurang	- Eksplorasi Energi Baru & Terbarukan PLTS, PLTMH, PLTB, PLTU	- Menyediakan Energi Listrik Terbarukan (Panas Bumi)	- Interkoneksi jaringan Listrik
	- Kelembagaan	- Pembentukan Pokja KP3EI - Advokasi KP3EI	- Fasilitasi Koordinator Kementrian	- Masing-masing Provinsi membentuk pokja KP3EI
	- SDM dan R & D yang Belum Mendukung	- SMK berbasis Komoditi - Peningkatan peran Politeknik - Peningkatan peran BPIJ - Peningkatan SDM Aparatur - Dukungan R & D	- Pendidikan berbasis kawasan - Reformasi Birokrasi - Dukungan Mitra kerja Internasional untuk pengembangan R & D	- Pengembangan SDM diarahkan pd penyelarasan program/ bidang dengan potensi pengembangan ekonomi disetiap koridor - Actionplan bersama
<b>Papua</b>	Belum terlaksananya sosialisasi MP3EI bagi Pemda Provinsi dan	Pokja pusat supaya segera melakukan sosialisasi MP3EI kepada Pemda Provinsi	1. Sub-Koridor Papua khususnya Mimika dan Merauke sedang dimulai	Belum bisa dilakukan dikenakan belum ada kejelasan rencana aksi

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Busines as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	Kabupaten/Kota dan Pihak terkait oleh Pokja Pusat	Papua, Pemda Kabupaten/Kota, Masyarakat dan dunia usaha	<p>proses media oleh masing-masing Pemda dengan masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>2. Untuk Kabupaten Mimika sudah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan MP3EI di Mimika, sambil menunggu fasilitas POKJA Pusat dan POKJA Provinsi</p>	MP3EI Koridor Papua, Kepulauan Maluku
	Belum terbentuknya POKJA Daerah tentang MP3EI di Provinsi Papua	Sedang menunggu rencana aksi POKJA Pusat tentang MP3EI di Koridor Papua – Kep. Maluku untuk dikoordinasikan dengan berbagai program/kegiatan di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota	Sambil menunggu sosialisasi oleh POKJA MP3EI Pusat, maka sedang disiapkan POKJA daerah yang melibatkan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya, terutama pada sub koridor Papua (Jayapura-Mimika-Merauke)	Sudah ada inisiatif dari koridor Papua (Mimika) untuk mempersiapkan diri dalam rangka implementasi MP3EI di Kabupaten Mimika
<b>Papua Barat</b>	<b>KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH</b> 1. Infrastruktur belum memadai	1. Mempercepat pembangunan dan	1. Mendorong Swasta/pelaku produksi	1. Membangun Jaringan Transportasi baik Laut,



Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	2. SDM aparatur dan masyarakat masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan infrastruktur (Jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, bandara, energi, dll)</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi SDM baik aparatur maupun masyarakat melalui pendidikan formal, diklat, magang, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>untuk mengembangkan infrastruktur produksi mereka</li> <li>2. Professional recruitment dan pemanggilan thd putra putri asli papua yang sudah eksis sebagai tenaga professionl di luar Papua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>maupun udara</li> <li>2. Kerjasama tenaga profesional</li> </ul>
	<p><b>DUNIA USAHA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Proses investasi masih berjalan lambat (hak ulayat, perizinan)</li> <li>2. BUMD belum berkembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan pelayanan investasi dengan pola satu pintu</li> <li>2. Mendorong BUMD bermitra dengan BUMN dan Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian insentif bagi upaya pengembangan investasi</li> <li>2. Membangun Kemitraan dengan Swasta Nasional Maupun asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standarisasi insentif ???</li> <li>2. Membangun Jaringan investasi regional, Nasional dan internasional</li> </ul>
	<p><b>REGULASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. RTRWP masih belum selesai</li> <li>2. Regulasi investasi masih terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat proses penyelesaian RTRWP sebagai dasar pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Pengembangan dan penyempurnaan regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat pemenuhan persyaratan Penyusunan RTRWP</li> <li>2. Membangun Regulasi yang memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. --</li> <li>2. Standarisasi regulasi investasi di dalam koridor ???</li> </ul>

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
		yang mengarah pada penciptaan iklim investasi yang baik	kemudahan kpd investor untuk berinvestasi	
<b>Maluku</b>	<p><b>SIMPUL KEGIATAN MIGAS</b> Pemenuhan kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik di lingkup koridor Papua-Kepulauan Maluku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala ekonomi pengembangan komoditas unggulan yang belum mencukupi</li> <li>• Keterbatasan infrastruktur</li> <li>• Kesulitan mengakses modal</li> <li>• Keterbatasan akses terhadap teknologi</li> <li>• kebijakan pemerintah terhadap pengembangan komoditas unggulan daerah (Lumbung Ikan Nasional )</li> </ul>	<p>Mendorong pembangunan Sumber Energi (Pemangkit) Listrik berbahan bakar gas di dalam koridor Papua-Kepulauan Maluku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan bisnis dan basis ekonomi</li> <li>• Pengembangan sumberdaya manusia pendukung perekonomian <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan konektivitas dan kualitas lingkungan fisik pendukung perekonomian</li> <li>▪ Pengembangan kelembagaan dan konektivitas kelembagaan pendukung</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama Pemerintah – Swasta untuk mendukung infrastruktur Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, mis: revitalisasi infrastruktur 12 Pelabuhan Perikanan Tangkap di Maluku dan budidaya laut</li> <li>- Percepatan Penyediaan infarastruktur di bidang Perkebunan (Maluku sebagai Provinsi rempah-rempah) dan Pariwisata</li> <li>- Kerjasama Pemerintah – NGO (ILO) untuk</li> </ul>	<p>Membangun komitmen bersama provinsi lain dalam hal pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Gas bagi pembangkit Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Jawa Timur sebagai daerah tujuan utama pemasaran hasil dalam negeri</li> <li>• Kerjasama dengan 7 Provinsi Kepulauan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Maluku Utara</li> </ul>

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Busines as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	<i>Action Plan</i> bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan (tata aturan dan kapasitas aparatur)</li> </ul>	perekonomian	pengembangan komoditas unggulan rumput laut <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk kemudahan investasi di Maluku</li> <li>Mereview dan memperbaiki permasalahan kelembagaan lainnya</li> <li>Membentuk KP3EI di Maluku</li> </ul>	
<b>Maluku Utara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iklm Investasi dan iklim Usaha</li> <li>Tata Ruang yang belum final</li> <li>Produk yang berdaya saing ekspor masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencabut perda yang menghambat investasi</li> <li>Meningkatkan Peran lembaga pelayanan Satu pintu</li> <li>Informasi ketersediaan lahan yang tidak bermasalah</li> <li>Percepatan penyelesaian Tata Ruang</li> <li>Meningkatkan produktivitas Tanaman pertanian,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyederhanaan Peraturan dan Birokrasi</li> <li>Pelaksanaan kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku Utara yang dianggarkan pada APBD-P 2011.</li> <li>Meningkatkan Value aded Produk unggulan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan Peraturan yang bersifat regional</li> <li>Penyusunan masterplan yang bersifat regional</li> <li>Tata Ruang Regional</li> <li>Peta Komoditas Unggulan Regional</li> </ul>

<b>Provinsi</b>	<b>Tantangan Pelaksanaan MP3EI</b>	<b>Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor</b>	<b>Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI</b>	<b>Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi</b>
	kurang dan pertumbuhan yang lambat	Perkebunan dan Perikanan		
	- Pelayanan/Pengelolaan Pelabuhan Yang Belum Optimal - Kapasitas pelabuhan yang relatif sedang	- Peningkatan Pelayanan Pelabuhan - Peningkatan pembangunan pelabuhan bertaraf nasional/internasional	- Mengupayakan Pengelolaan Pelabuhan Oleh Main Line Operator (MLO)	- Provinsi Sekitar Dapat Memanfaatkannya Sebagai Pelabuhan Muat Komoditi Ekspor
	- Meningkatkan transportasi laut karena merupakan provinsi kepulauan	- Pembangunan pelabuhan-pelabuhan di wilayah dataran Halmahera	- Jalur pelabuhan yang menghubungkan sentra-sentra produksi	- Jalur perhubungan laut
	- Sarana Pelabuhan yang belum memadai	- Meningkatkan kapasitas pelabuhan ekspor	- Membangun pelabuhan tiap-tiap kepulauan	- Konektivitas setiap pelabuhan di Indonesia timur
<b>NTB</b>	Sektor Pariwisata yang perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan maupun pengeluaran wisatawan di beberapa Kawasan wisata yaitu, Kawasan Senggigi – Tiga Gili, Kawasan Mandalika, Kawasan Rinjani, Kawasan Teluk Saleh – Moyo – Tambora,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Bandara Internasional Lombok (BIL), M.Salahudin dan Brangbiji serta akses jalan kawasan strategis</li> <li>• Pembangunan Global Hub Kayangan, PPN Teluk Awang, PP Teluk Santong, Pelabuhan Kontainer Lembar, Labuhan Badas,</li> </ul>	Koridor Bali – Nusa Tenggara dengan keunggulan dan potensi strategis sebagai Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional.

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	<i>Action Plan</i> bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
		<p>Kawasan Maluku – Jelenga, Kawasan Hu’U, Kawasan Teluk Bima dan Seluruh Kawasan Pariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadikan Kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.</li> <li>• Mengembangkan Industri Penunjang Pariwisata.</li> </ul>	<p>Pel. Bima, Waworada serta Terminal <i>Cruise</i> di Tawun Sekotong, Labuhan Badas, Teluk Bima dan Hu’U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangkit listrik di P.Lombok ( 140 MW) dan P. Sumbawa ( 138 MW).</li> </ul>	
	Sektor Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan sapi, jagung dan rumput laut (PIJAR) dan Padi</li> <li>• Mengembangkan industri olahan bahan baku PIJAR dan komoditi unggulan lokal di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan bendungan Pandanduri, Rababaka, dan Bintang Bano.</li> <li>• Pembangunan Jalan lingkar selatan P. Lombok dan P. Sumbawa.</li> </ul>	

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
		<p>kawasan strategis Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadikan Kawasan Bandar Kayangan, Sekotong, Teluk Saleh dan Teluk Bima sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri agro dan Kelautan.</li> </ul>		
Sulawesi Tengah	<p><b>KESIAPAN DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tata Ruang Wilayah Provinsi belum selesai.</li> <li>Ketersediaan Energi Listrik yang masih kurang</li> <li>Pembebasan Lahan</li> <li>Belum Optimalnya akses transportasi darat antar wilayah.</li> <li>Pelabuhan Pantoloan yang diusulkan menjadi Hub Port International</li> <li>Sarana Pelabuhan yang belum memadai di beberapa Kabupaten.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Penyelesaian Tata Ruang Wilayah</li> <li>Pembangunan Infrastruktur Listrik</li> <li>Mengoptimalkan peran Tim Lahan yang ada.</li> <li>Membangun Infrastruktur Jalan, Pelabuhan dan Bandara</li> <li>Meningkatkan Status Jalan yang ada saat ini.</li> <li>Meningkatkan Status pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eksplorasi Energi Baru dan Terbarukan; PLTS, PLTMH dan PLTA.</li> <li>Mengkoordinasikan Permasalahan yang ada ke masing-masing Kab/Kota</li> <li>Sharing Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian Tata Ruang Sulawesi</li> <li>Interkoneksi jalan antar provinsi melalui pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara.</li> <li>Penyusunan Dokumen Penggunaan Lahan Provinsi Sulawesi Tengah.</li> </ul>

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Busines as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	<i>Action Plan</i> bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	7. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara.			
	<p><b>DUNIA USAHA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan Kawasan Industri Kota Palu menjadi KEK di kota Palu belum ditetapkan</li> <li>2. Masih kurangnya produk yang memiliki daya saing ekspor</li> <li>3. Belum optimalnya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha dan industri.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status KEK Kota Palu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>- Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perkebunan serta perikanan.</li> <li>- Memfasilitasi kemitraan petani, pelaku usaha dan industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pihak swasta untuk melakukan investasi dalam bidang pengolahan produk-produk yang memiliki daya saing ekspor</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah masing-masing produk unggulan</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana serta pemasaran hasil produk setiap komoditas hasil perkebunan serta perikanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Menjalin Kerjasama dalam hal peningkatan akses informasi pasar dan inovasi teknologi</li> <li>– Temu Usaha melalui Program Kemitraan antara Petani, Pelaku Usaha antar Daerah.</li> </ul>
	<p><b>REGULASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja.</li> <li>2. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Informasi dibidang investasi yang lebih komprehensif serta mengoptimalkan fasilitas pelayanan satu pintu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji Peraturan yang menghambat dunia usaha</li> </ul>	Mengoptimalkan Kerjasama antar Provinsi.

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	<i>Action Plan</i> bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	Penanaman Modal. 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Upah Minimum Provinsi (Setiap Tahun) 4. SK Walikota Palu No.642/326/HK/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Penunjukan Lokasi Industri Palu 5. Perda No 03 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) 6. SK Gubernur Sulawesi Tengah No.500/340/Ro.Ekban g G.ST/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Relokasi Kapet Batui menjadi Kapet Palapas.	- Penyederhanaan Peraturan dan Birokrasi		



Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Busines as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	<i>Action Plan</i> bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	<p><b>SIMPUL KEGIATAN MIGAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya konflik antara pemberian konsesi kontrak karya(lama) oleh pemerintah pusat dengan ijin usaha pertambangan baru yang diberikan oleh pemerintah daerah.</li> <li>2. Terjadinya tumpang tindih tata guna lahan antara pertambangan dan peruntukan lainnya, terutama dengan kehutanan sehingga bermuara pada sulit atau lamanya pemberian izin usaha pertambangan.</li> <li>3. Banyaknya kegiatan pertambangan yang belum beroperasi karena lambannya perjanjian daerah dan juga karena komitmen pengusaha sendiri.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi.</li> <li>- Percepatan pemberian ijin operasi kepada perusahaan tambang yang telah menyelesaikan tahapan eksplorasi.</li> <li>- Adanya Transparansi bagi para investor dalam pembelian royalti kepada Daerah sehingga masuk pada Pendapatan Daerah berupa dana transfer Pusat ke Daerah berupa Pajak Penghasilan Migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi antar instansi dan antara tingkatan Pemerintah Daerah untuk mengawasi tahapan kegiatan pengusaha-pengusaha yang telah memiliki ijin usaha pertambangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya pengawasan bersama dalam bidang pertambangan migas.</li> </ul>

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Busines as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	<i>Action Plan</i> bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	<p>4. Adanya ketidakpastian pasokan bahan baku bagi usaha-usaha pengolahan (smelter) independen dikarenakan hasil tambang dari grup-grup besar sudah diperuntukan (dijual) bagi unit pengolahan milik grupnya sendiri.</p> <p>5. Kegiatan pertambangan nikel di Bahodopi Kab.Morowali belum bisa terlaksana karena areal seluas ± 20 Ha yang merupakan bagian dari rencana pembuatan jalan (panjang 600 m, dan lebar 30 m ) yang berada diluar wilayah Kontrak Karya dan berada diareal hutan lindung di Provinsi Sulawesi Selatan</p>			

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Busines as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	<i>Action Plan</i> bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	<p><b>SIMPUL TANAMAN PANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas padi, jagung, ubi kayu dan kedele</li> <li>2. Keberlanjutan lumbung pangan memerlukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani.</li> <li>3. Perlunya peningkatan keberadaan dan fungsi jaringan irigasi dan sarana produksi.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan areal pertanian</li> <li>- Pembangunan lumbung, gudang dan unit pengolahan</li> <li>- Pemanfaatan teknologi dan penggunaan benih unggul;</li> </ul>	<p>Strategi Pengembangan masing-masing komoditas berdasarkan pendekatan Kawasan Satuan Wilayah Pengembangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kerjasama Regional dalam hal inovasi teknologi, pemasaran hasil dan pengolahan skala industri.</li> </ul>
	<p><b>SIMPUL PERIKANAN</b></p> <p>Optimalisasi Konektivitas Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Palu : Pabrikasi, Canning dan Shipping;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Industri Pengolahan (Processing and Canning)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penyediaan sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kerjasama Regional dalam hal inovasi teknologi, pemasaran hasil dan pengolahan skala industri.</li> </ul>

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	<p>Integrasi KEKI</p> <p>2. Kabupaten Donggala : Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Landing Space Tuna, dan Industri Pengolahan Tuna - Cakalang;</p> <p>3. Kabupaten Toli-Toli : Pembangunan Kawasan Outering Fishing Port, Industri Perikanan Tangkap Terintegrasi, khususnya Tuna - Cakalang;</p> <p>4. Kabupaten Parigi Moutong : Pengembangan Industri pengolahan Hasil Perikanan Terintegrasi; khususnya Rumput Laut dan Pelagis Besar/Kecil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Tambak/Kolam Rakyat dan Tambak/Kolam Intensif.</li> <li>- Stimulan Permodalan Kerja</li> <li>- Penataan Sarana dan Prasarana TPI/PPI</li> <li>- Pemberdayaan Nelayan Skala 3-10 GT untuk Tuna/Cakalang</li> <li>- Restrukturisasi Armada &gt; 30 GT</li> <li>- Upaya Pengembangan Teknologi Pembesaran Sidat</li> <li>- Pengembangan Teknologi Pengolahan Sidat ( Unagi, dsb.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pihak swasta untuk berinvestasi dikawasan masing-masing cluster yaitu; Cluster 1 : Selat Makassar dan Laut Sulawesi; Cluster 2 : Teluk Tomini dan Cluster 3 : Teluk Tolo serta termasuk Kawasan KEK Kota Palu.</li> <li>- Pihak Investor yang memiliki izin penangkapan maupun budidaya diwajibkan untuk membangun industri pengolahan guna mendapatkan nilai tambah (value added) bagi daerah provinsi Sulawesi Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kerjasama yang terpadu dalam bidang pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah Pulau Sulawesi</li> </ul>

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	<i>Action Plan</i> bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	5. Kabupaten Poso: Pengembangan Industri Budidaya dan Pengolahan Sidat; 6. Kabupaten Tojo Unauna: Pengembangan Industri Budidaya & Pengolahan Rumput Laut. 7. Kabupaten Banggai: Pengembangan Industri Perikanan Tangkap Terpadu, khususnya Komoditas Ikan Demersal dan Udang; Pengolahan; Canning, Shipping; 8. Kabupaten Morowali : Kawasan Minapolitan Rumput Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pengolahan Rumput Laut ( gudang, lantai jemur, dan industri pengolahan pada lokasi KIP Kota Palu)</li> <li>- Pengembangan Cakupan Wilayah Pemasaran Produk Perikanan</li> </ul>		
	<b>SIMPUL PERKEBUNAN</b> 1. Permintaan pasar ekspor membutuhkan biji kakao dan produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan pilot project biji kakao fermentasi sebagai</li> </ul>	Mendorong Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi dalam penyiapan sarana dan	- Melanjutkan Program GERNAS dan Pengembangan industri

Provinsi	Tantangan Pelaksanaan MP3EI	Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor	Inovasi (Semangat Not Busines as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI	<i>Action Plan</i> bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi
	<p>olahan kakao (butter, powder, cake) yang berkualitas sementara penerapan SNI biji kakao masih bersifat sukarela dan sekitar 70 % diekspor dalam bentuk biji kakao, sehingga nilai tambah tidak dinikmati oleh petani.</p> <p>2. Banyaknya tanaman tua, terkena penyakit, dan perlu bukaan lahan baru.</p> <p>3. Produktivitas biji kakao masih rendah</p> <p>4. Tingginya tarif bea masuk kakao olahan di beberapa negara tujuan ekspor dan masih adanya diskriminasi tarif bea masuk kakao Olahan di Eropa</p> <p>5. Penerapan Bea Keluar bagi produk kakao</p>	<p>percontohan aplikatif operasional teknis dan pemanfaatan biji kakao fermentasi yang bernilai tambah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peremajaan</li> <li>- Rehabilitasi</li> <li>- Intensifikasi</li> <li>- Mendorong Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi terhadap permasalahan tersebut yaitu penetapan tarif bea keluar dilakukan secara spesifik dan dalam besaran rupiah</li> </ul>	<p>prasarana, teknologi serta input.</p> <p>Mendorong pihak swasta untuk menanamkan investasi di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di kawasan industri kota Palu.</p> <p>Mendorong pihak swasta untuk membeli kakao yang telah difermentasi</p>	<p>berbasis komoditas wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan pemasaran komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah</li> <li>- Koordinasi antar stakeholder terkait.</li> </ul>

<b>Provinsi</b>	<b>Tantangan Pelaksanaan MP3EI</b>	<b>Fokus tiap provinsi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan MP3EI, Terutama untuk mendorong dan Memfasilitasi Investor</b>	<b>Inovasi (Semangat Not Business as Usual) yang akan dilaksanakan untuk realisasi MP3EI</b>	<b>Action Plan bersama provinsi lain untuk pembangunan Koridor Ekonomi</b>
	Pembahasan kembali PMK No.67 thn 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar & Tarif bea Keluar, UU No.17 thn 2006 tentang kepabean, PP No.55 thn 2008 tentang Pengenaan Bea keluar terhadap Barang Ekspor.			

### Rekomendasi:

- Perlunya sosialisasi MP3EI dengan melibatkan sektor swasta dan perbankan di daerah dan dukungan sekretariat KP3EI pusat sangat dibutuhkan untuk realisasi MP3EI di daerah. Kementerian penanggung jawab masing-masing koridor untuk mengkoordinasikan ke K/L terkait pengembangan masing-masing koridor (investasi, kebijakan spesifik)
- Mendorong pembentukan kelembagaan KP3EI baik di provinsi, Kab/Kota.
- Masih banyak tantangan di daerah untuk merealisasikan MP3EI, diantaranya:
  - Deregulasi (Debottlenecking):
    - Regulasi dan Penegakan Hukum
    - Pengendalian dan pemanfaatan ruang
    - Transaction Cost yang tinggi
    - Penyelesaian Perda RTRW Provinsi, Kab/Kota
  - Realisasi Investasi Rendah
  - Ketersediaan infrastruktur dasar yang masih kurang
  - Produktivitas masih rendah
  - Kurangnya dukungan Lembaga Perbankan dan Keuangan (Pembiayaan)
  - Penyelesaian pembangunan infrastruktur
  - SDM
  - Pemberian insentif dan disinsentif

Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka diperlukan konsistensi kebijakan yang memberi peluang percepatan dan perluasan MP3EI di KTI

- Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan pihak swasta (KADIN, HIPMI, Gapensi, BUMN, Perbankan dll) dan mitra pembangunan internasional (peningkatan kapasitas) untuk secara konsisten mendukung kebijakan masing-masing koridor di KTI.
- Perlunya kajian mengenai operasionalisasi MP3EI di tiap provinsi dan regional yang bisa dilaksanakan dengan melibatkan JiKTI melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
- Pemerintah Pusat diharapkan membuka ruang bagi daerah untuk mengusulkan program inisiatif baru (New Initiatives)